

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2016-2021**

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2016 – 2021



**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

Jalan Raya Belilas Km. 06 Pematang Reba Rengat, Telp. (0769) 341194



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmad dan hidayahNya sehingga kami dapat menyelesaikan Perubahan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016-2021 dan selanjutnya kami kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Penyusunan Dokumen Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (RPJMD) yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Periode 5 (Lima) Tahun yang berakhir pada T.A 2021 dan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu sehingga dengan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu Maka Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016-2021 Menjadi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016-2021.

Dengan adanya penetapan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016-2021 Menjadi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016-2021, maka dapat diimplementasikan dalam bentuk kebijakan, Program dan Kegiatan dalam menyelenggarakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu serta menyelenggarakan pelayanan kepada Masyarakat.

Demikian penyusunan Rencana Strategis ini diharapkan dapat diimplementasikan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan, program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016-2021.

Rengat, Mei 2019
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN INDRAGIRI HULU



Drs, ERPANDI
Pembina Utama Muda
NIP. 19630815 199309 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	10
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	10
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	15
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	20
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	22
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	22
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	23
3.3 Telaah Renstra Kementerian/ Lembaga (K/L) dan Renstra Perangkat Daerah	27
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	29
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	31
BABA IV TUJUAN DAN SASARAN	33
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	33
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	36
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	38
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	46
BAB VIII PENUTUP	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai Dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dan Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu mempunyai Tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang Perhubungan.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu mempunyai fungsi antara lain adalah merumuskan Kebijakan Teknis di Bidang Perhubungan yang meliputi Teknis Lau Lintas dan Parkir, Teknis Angkutan dan Terminal, Teknis Sarana dan Teknis Operasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Tupoksi diatas perlu disusun dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan untuk 5 (lima) tahun kedepan dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana daerah dituntut untuk lebih mengembangkan diri dalam melaksanakan pembangunan, maka untuk itu diperlukan sebuah perencanaan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan pembangunan daerah.

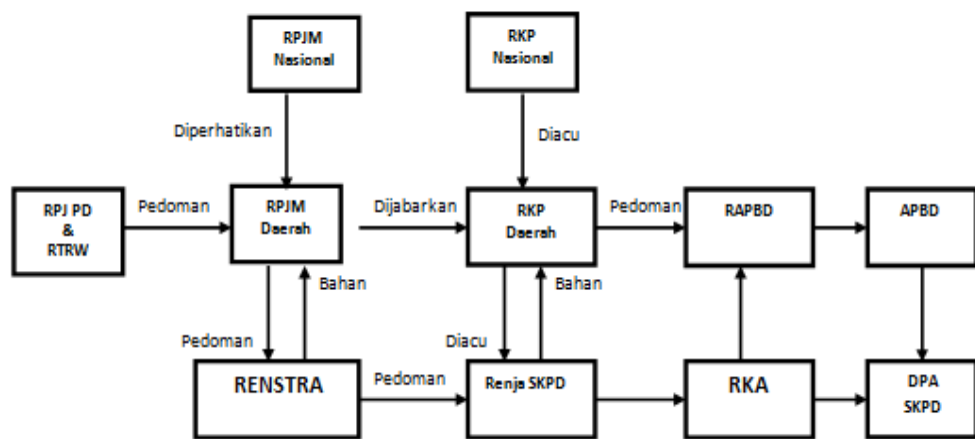
Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 – 2021 ini berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Rencana Strategis ini memuat suatu dokumen perencanaan resmi Dinas Perhubungan berisi tentang visi yang akan dituju oleh Dinas perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan yang dijabarkan dalam beberapa misi yang mempunyai tujuan dan sasaran yang jelas disertai arah kebijakan dan strategi yang dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan untuk pencapaiannya. Secara Umum Renstra OPD diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, yaitu :

1. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai OPD dalam lima tahun kedepan;
2. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Proses Penyusunan RENSTRA Dinas Perhubungan ini berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 diawali dengan pembentukan Tim Penyusun, pengumpulan /informasi, penyusunan rancangan, perumusan rancangan, pengolahan data/informasi, analisis gambaran pelayanan, perumusan isu-isu strategis, perumusan

visi-misi-tujuan sasaran, merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun, melaksanakan diskusi mendalam antar bidang pembangunan, penyusunan rancangan akhir, verifikasi, pengesahan Bupati serta penetapan oleh Kepala Dinas Perhubungan untuk dapat dilaksanakan.

Gambar 1.1
Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan



Sesuai yang diamanatkan dalam Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan pembangunan Nasional, maka kedudukan dan peran Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016-2021 adalah :

1. Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu karena merupakan bagian dari Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hulu,
2. Merupakan penjabaran dan pendalaman dari Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah maupun Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

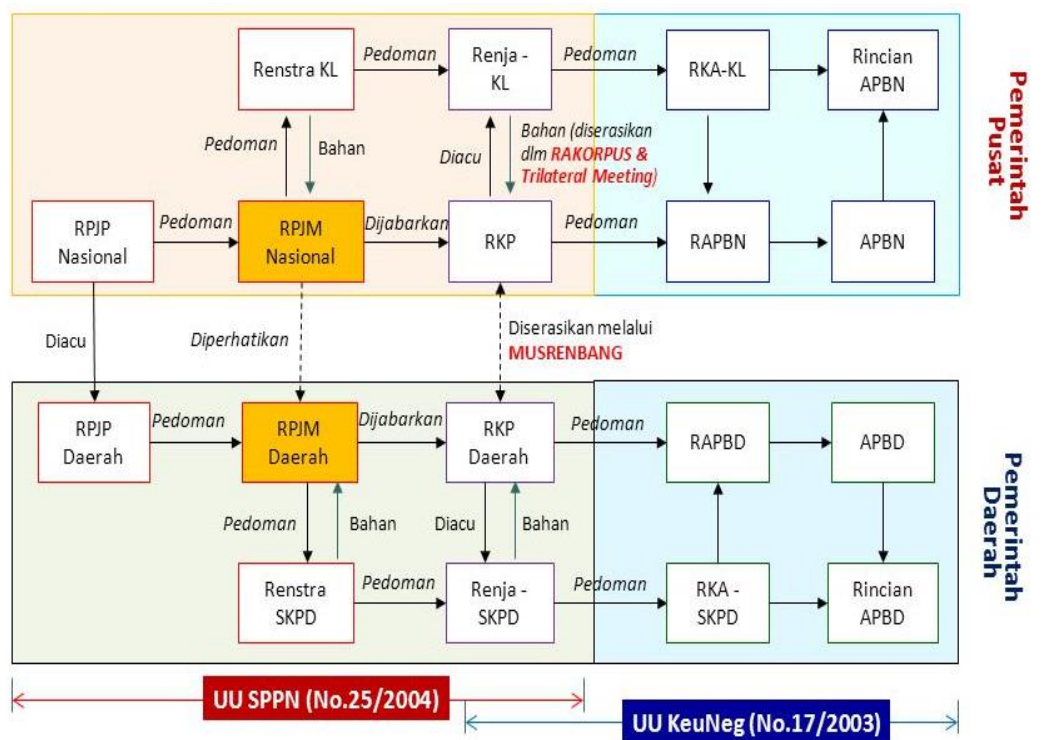
Selanjutnya, Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu ini akan digunakan sebagai Pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu dan sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu yang dalam kaitan ini pula substansi RKA tersebut akan tercermin pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Indragiri Hulu.

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 ini disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul serta tetap mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) kementerian Perhubungan, maupun Renstra Dinas Perhubungan Propinsi, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam penyusunan.

Program antara Kabupaten, Provinsi dan Kementerian, untuk mengantisipasi perubahan lingkungan strategis baik di tingkat lokal, nasional ataupun internasional yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun ke depan yang mempengaruhi perubahan struktur perekonomian dan pembangunan sektor Perhubungan di Kabupaten Indragiri Hulu.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu merupakan sub sistem dari sitem pembangunan jangka menengah daerah, sehingga untuk menjaga konsistensi pelaksanaan pembangunan bidang Perhubungan di kabupaten Indragiri Hulu berpedoman pada RPJMD Pemerintah daerah kabupaten Indragiri Hulu tahun 2016-2021, RENSTRA Kementerian Perhubungan RI Tahun 2014-2019, Serta RENSTRA Dinas Perhubungan, Provinsi Riau 2014-2019. Sehingga terjadi sinkronisasi Program dan Kegiatan antara Rentra Dinas Perhubungan dengan Renja Dinas Perhubungan.

Gambaran hubungan Rentra SKPD, RPJMD, Rentra Kementerian dan Renja SKPD disajikan dalam gambar berikut :



1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sebagai dokumen perencanaan formal suatu instansi Pemerintah, Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu periode 2016-2021 disusun melalui dasar :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
7. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Dalam Pembangunan Daerah;
9. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 tahun 2017 tentang Tahapan dan Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu;
14. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 62 tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu;
15. Peraturan daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas peraturan daerah Nomor 3 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 – 2021 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 – 2021.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu dimaksudkan untuk menyediakan tolok ukur pelaksanaan strategi pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu yang akan dicapai selama 5 tahun ke depan dan merupakan Pedoman yang digunakan untuk melakukan perencanaan jangka pendek yaitu menentukan program dan kegiatan tahunan. Maksud penyusunan perencanaan strategis ini adalah sebagai suatu alat manajemen untuk membantu organisasi Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dan memastikan anggota organisasi bekerja berdasarkan tujuan yang sama. Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu adalah antara lain :

1. Memberikan Arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu lima 2016-2021 dapat dicapai;
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
3. Merumuskan Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran yang kemudian dijabarkan dalam kebijakan dan program perencanaan pembangunan.
4. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu guna menciptakan perencanaan pembangunan yang terpadu.
5. Menyediakan tolok ukur kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu.
6. Mendorong adanya proses pemikiran yang adaptif sehingga tercipta dan terpeliharanya keselarasan antara organisasi Dinas Perhubungan dan lingkungan internal yang kondusif dan menghindarkan timbulnya penyimpangan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) organisasi atau disorientasi dari Core Businessnya.
7. Membantu pimpinan organisasi Dinas Perhubungan untuk mengintegrasikan dan mengendalikan berbagai kegiatan dalam internal organisasi untuk mencapai sasaran strategis

sehingga terhindar dari ketidakkonsistenan dengan rencana yang telah ditetapkan.

Tujuan Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu yaitu untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah Kabupaten Indragiri Hulu yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJM Daerah Kabupaten Indragiri Hulu

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB. II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang

telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil Telaah terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan

BAB. III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya

3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa

saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang .
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
- BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu merupakan salah satu unsur Organisasi Perangkat Daerah yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tentang Organisasi Dinas Kabupaten Indragiri Hulu.

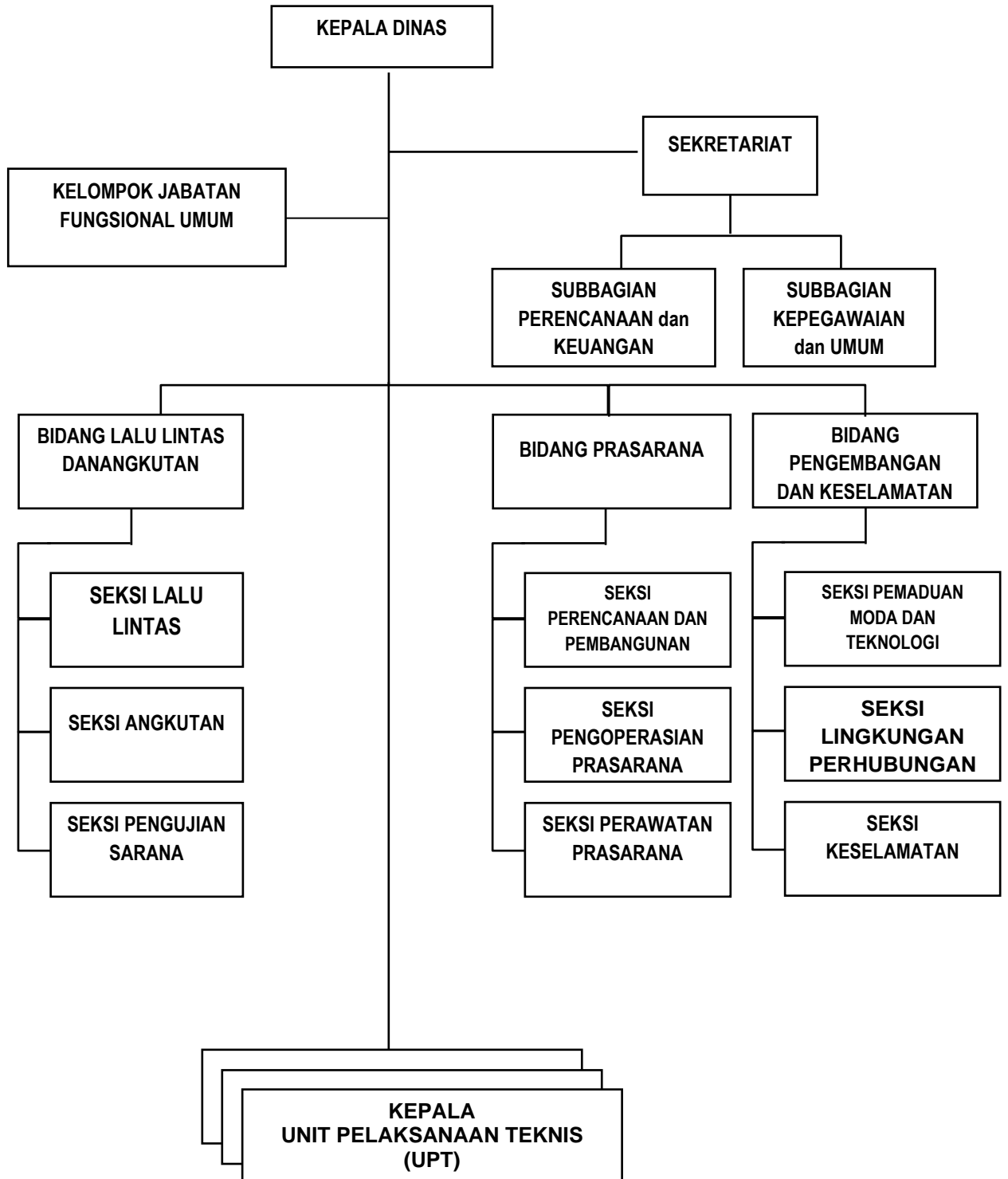
Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu. Tugas Pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu yaitu: Membantu Bupati Melaksanakan Urusan Otonomi Daerah Dan Tugas Pembantuan Di Bidang Perhubungan. Sedangkan untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perhubungan mempunyai Fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijaksanaan di bidang Perhubungan
2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Perhubungan
3. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Dinas Perhubungan
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas Perhubungan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 62 Tahun 2016, Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu adalah sebagai berikut:

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN

Gambar 1
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu



Dengan susunan organisasi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan, maka uraian tugas dan fungsinya sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Dinas Perhubungan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi urusan Dinas Perhubungan, dan fungsi Dinas Perhubungan, sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana program dan anggaran di Dinas Perhubungan ;
- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di Dinas Perhubungan;
- 3) Pemberian kajian teknis perizinan dan/atau rekomendasi;
- 4) Pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas Perhubungan;
- 5) Pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengadilan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan;
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan pengelolaan data, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi penyusunan program dan anggaran, ketatausahaan, pembinaan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, kehumasan, serta keuangan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan program dan anggaran bidang umum, program dan keuangan;
- 2) Pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran Dinas Perhubungan;
- 3) Penyelenggaraan ketatausahaan;
- 4) Pembinaan kepegawaian;
- 5) Pengelolaan sarana dan prasarana;
- 6) Penyelenggaraan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas;
- 7) Penyelenggaraan fungsi kehumasan;
- 8) Pengelolaan keuangan;
- 9) Pengkoordinasian dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Adapun uraian tugas sekretariat adalah sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan Perencanaan pada Sub Bagian Umum, Program dan Keuangan serta Kepegawaian Dinas;
- 2) Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas pada Sub Bagian Umum, Program dan Keuangan serta Kepegawaian Dinas;
- 3) Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitas dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Sub Bagian Umum Program dan Keuangan serta Kepegawaian Dinas;
- 4) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Sub Bagian Umum, Program dan Keuangan serta Kepegawaian Dinas;
- 5) Menyelenggarakan pelayanan administrasi, keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, umum dan rumah tangga Dinas;
- 6) Melaksanakan koordinasi pelayanan administrasi Dinas;
- 7) Mengkoordinasikan rapat dinas dan keprotokolan;
- 8) Mengkoordinasikan Laporan Tahunan Dinas meliputi LPPD, LKPJ dan LAKIP;
- 9) Mengkoordinasikan penyusunan SOP dilingkungan Dinas;
- 10) Menyelenggarakan Fasilitasi dan asistensi;
- 11) Pelasanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan.

Adapun dalam melaksanakan tugas pokok bidang lalu lintas dan angkutan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan, dan pengujian sarana;
- 2) Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan, dan pengujian sarana;
- 3) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas, angkutan, dan pengujian sarana;
- 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Prasarana

Bidang Prasarana di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana.

Adapun dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Prasarana mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian prasarana;
- 2) Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian prasarana;
- 3) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian prasarana;
- 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Bidang Pengembangan dan Keselamatan

Bidang Pengembangan dan Keselamatan di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan keselamatan transportasi;

Adapun dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Pengembangan dan Keselamatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan, dan keselamatan;
- 2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan, dan keselamatan;
- 3) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pemaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan, dan keselamatan; dan
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (Pengujian Kendaraan Bermotor)

Unit Pelaksana Teknis Dinas atau disingkat UPTD dipimpin oleh Kepala UPT dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas , UPT Pengujian Kendaran bermotor mempunyai tugas pokok Penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor, Penyampaian laporan pelaksanaan tugas secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Dinas, Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Untuk melaksanakan tugas Pokok sebagai mana dimaksud diatas, UPT Pengujian Kendaran Bermotor menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perencanaan yang merupakan segala usaha kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, penilaian dan penyusunan rencana untuk melaksanakan tugas pokok.

- 2) Pelaksanaan yang merupakan segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan tugas pokok sesuai rencana yang ditetapkan.
- 3) Pembinaan yang merupakan segala usaha kegiatan kearah peningkatan pelayanan dalam usaha melaksanakan tugas pokok.
- 4) Pengawasan yang merupakan segala usaha kegiatan untuk melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 5) Pengadministrasian yang merupakan segala usaha dan kegiatan dibidang ketata usahaan umum perlengkapan dan keuangan.
- 6) Pengkoordinasian yang merupakan segala usaha dan kegiatan untuk mengadakan hubungan kerja dan kerja sama dengan bidang-bidang lain dilingkungan Dinas Perhubungan guna kelancaran Pelaksanaan tugas.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu dalam melaksanakan Tugas pokok tidak terlepas dari sumber daya yang dimiliki yaitu sumber daya manusia baik itu aparatur maupun perusahaan-perusahaan / organisasi yang bergerak dalam bidang transportasi, atau sumber daya modal berupa anggaran/ asset.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

- a. Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kab.Indragiri Hulu

No	Pegawai	Jumlah	%
1.	PNS	36	35,64
2.	CPNS	2	1,98
3.	Honorer	63	62,37
	TOTAL	101	100

- b. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai	
		PNS/ CPNS	Honorer
1.	Doktor (S-3)	-	-
2.	Pasca Sarjana (S-2)	2	1
3.	Sarjana (S-1)	21	23
4.	Diploma (D-3)	3	-
5.	Diploma (D-2)	-	-
6.	SLTA sederajat	12	35
7.	SLTP sederajat	-	2
8.	SD sederajat	-	3
	TOTAL	38	63

- c. Jumlah Pegawai yang telah Mengikuti Pendidikan Penjurangan dan Keahlian

No	Pelatihan Penjurangan	Jumlah Pegawai
1.	SPAMEN	1
2.	PIM III	2
3.	PIM IV	7
4.	ADUM/SEPADA	5
5.	PKB	3
6.	Terminal	1
	TOTAL	19

- d. Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan

No	Golongan	Jumlah (Orang)
1.	IV	5
2.	III	26
3.	II	7
4.	I	-
	TOTAL	38

- e. Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf

No	Jabatan	Jumlah Pegawai
1.	Eselon II B (Kepala Dinas)	1
2.	Eselon III A (Sekretaris)	1
3.	Eselon III B (Kepala Bidang)	3
4.	Eselon IV A (Kasubbag/ Kasie/ Ka.UPT)	12
5.	Eselon IV B (Kasubbag TU UPT)	1
6.	Staf	20
	TOTAL	42

2.2.2 Sumber Daya Lainnya

Sumber Daya Lainnya berupa Aset bergerak dan tidak bergerak

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Organisasi Perangkat Daerah menunjukkan tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD/OPD periode sebelumnya 2011 - 2015, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD/OPD, dan/atau indikator lainnya seperti MDG's ataupun indikator lain yang telah diratifikasi oleh pemerintah, yang berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut, serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan

pelayanan SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD. Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu merupakan OPD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Dengan demikian, untuk mengetahui kinerja pelayanan Dinas Perhubungan didasarkan pada review pencapaian sasaran strategis Renstra Dinas perhubungan Tahun 2011 – 2015 (Tabel T-C.23).

Tabel 2.1

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN INDRAGRIRI HULU**

Tabel T-C.23

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Pada Tahun ke				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	Persentase ketersediaan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	50%	-	-	40%	42,5 %	45%	47,5 %	50%	40%	42,5 %	45%	47,5%	50%	1	1	1	1	1
2	Persentase Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang dipelihara	50%	-	-	40%	42,5 %	45%	47,5 %	50%	40%	42,5 %	45%	47,5%	50%	1	1	1	1	1
3	Persentase Penurunan Pelanggaran Angkutan Umum di Jalan	47,5%	-	-	37,5 %	40%	42,5 %	45%	47,5 %	37,5 %	40%	42,5 %	45%	47,5 %	1	1	1	1	1
4	Angka Kecelakaan Lalu Lintas Jalan	<650	-	-	>1.0 00	<950	<850	<750	<650	>1.0 00	<950	<850	<750	<650	1	1	1	1	1
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	2,75	-	-	2,4	2,5	2,6	2,65	2,75	2,4	2,5	2,6	2,65	2,75	1	1	1	1	1
6	Meningkatnya PAD Sektor Perhubungan	RP. 250.00 0.000	-	-	RP. 100. 000. 000	RP. 150. 000. 000	RP. 200. 000. 000	RP. 225. 000. 000	RP. 250. 000. 000	RP. 100. 000. 000	RP. 150. 000. 000	RP. 200. 000. 000	RP. 225.00 0.000	RP. 250. 000. 000	1	1	1	1	1
7	Presentase Temuan Audit BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	100%	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	1	1	1	1	1
8	Nilai Akuntabilitas	45 (C)	-	-	25 (D)	30 (D)	35 (C)	40 (C)	45 (C)	26,5 (D)	30 (D)	36 (C)	44 (C)	46 (C)	1	1	1	1	1

Tebel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu

Tabel T-C.24

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PENDAPATAN DAERAH	773.200.000	808.200.000	889.700.000	1.017.784.000	1.058.285.800	798.818.500	1.023.832.525	1.828.458.500	966.277.500	988.311.100	1	1	2	1	1	909.433.960	900.562.720
PENDAPATAN ASLI DAERAH	773.200.000	808.200.000	889.700.000	1.017.784.000	1.058.285.800	798.818.500	1.023.832.525	1.828.458.500	966.277.500	988.311.100	1	1	2	1	1	909.433.960	900.562.720
• Retribusi Daerah	773.200.000	808.200.000	889.700.000	1.017.784.000	1.058.285.800	798.818.500	1.023.832.525	1.828.458.500	966.277.500	988.311.100	1	1	2	1	1	909.433.960	900.562.720
• Lain-lain PAD yang sah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• Sumbangan pihak ketiga																	
BELANJA DAERAH	9.048.192.586	16.199.025.353	17.775.771.915	14.914.724.707	12.143.286.203	27.043.202.873	8.594.851.671	16.606.571.507	13.964.120.975	11.816.315.648	3	1	1	1	1	14.016.200.153	17.549.808.099
Belanja tidak langsung	2.845.582.046	3.861.505.453	3.329.666.115	4.260.992.807	3.896.486.103	10.867.966.327	3.063.347.268	3.190.523.534	3.919.418.187	3.786.724.408	4	1	1	1	1	3.638.846.505	5.221.371.022
• Belanja Pegawai	2.845.582.046	3.861.505.453	3.329.666.115	4.260.992.807	3.896.486.103	10.867.966.327	3.063.347.268	3.190.523.534	3.919.418.187	3.786.724.408	4	1	1	1	1	3.638.846.505	5.221.371.022
Belanja langsung	6.202.610.540	12.337.519.900	14.446.105.800	10.653.731.900	8.246.800.100	16.175.236.546	5.531.504.403	13.416.047.973	10.044.702.788	8.029.591.240	3	0	1	1	1	10.377.353.648	12.328.437.77
• Belanja pegawai	450.750.000	836.050.000	1.657.225.000	1.787.790.000	1.184.430.000	452.520.500	802.350.000	1.635.275.000	1.761.640.000	1.182.780.000	1	1	1	1	1	1.183.249.000	1.183.273.100
• Belanja barang & jasa	3.327.005.610	5.559.657.860	7.050.376.800	6.719.132.600	4.631.177.500	13.214.857.046	4.064.526.823	6.418.816.723	6.157.936.788	4.456.376.740	4	1	1	1	1	5.457.470.074	7.400.080.209
• Belanja modal	2.424.854.930	5.941.812.040	5.738.504.000	2.146.809.300	2.431.192.600	2.507.859.000	664.627.580	5.361.956.250	2.125.126.000	2.390.434.500	1	0	1	1	1	3.736.634.574	3.745.083.768
TOTAL	-8.274.992.586	-15.390.825.353	-16.886.071.915	-13.896.940.707	-1.085.000.403	-6.244.384.373	-7.571.019.146	-14.778.113.007	-12.997.843.475	-10.828.004.548	3	0	1	1	1	-13.106.766.193	-16.649.245.379

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Indikator Kinerja	Tantangan	Peluang
Indikator dan Pemasangan Sarana dan Prasarana Jalan	Banyaknya rambu-rambu lalu lintas yang hilang/rusak karena ulah masyarakat Pelebaran/Peningkatan ruas jalan	Kebutuhan yang meningkat Tingginya arus Lalu Lintas Peraturan perundangan tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dll
Pengawasan di Jalan	Kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dan teknis Belum adanya Peralatan pengawasan (Jembatan Timbang) Minimnya SDM (PPNS)	Regulasi yang memungkinkan Adanya sangsi terhadap pelanggaran
Pembuatan izin Trayek	Banyaknya kendaraan yang sudah melampaui batas usia pakai	Kebutuhan Masyarakat terhadap angkutan Regulasi yang memungkinkan
Perparkiran	Lahan parkir ada yang digunakan pedagang kaki lima Ruas dan Prasarana parkir belum memadai	Penataan Parkir yang efisien dalam penggunaan lahan Regulasi yang memungkinkan
Rekomendasi Ijin angkutan barang	Belum adanya pool kendaraan yang memenuhi persyaratan Belum adanya Tenaga Teknik pada perusahaan tersebut	Adanya aturan yang memungkinkan Peningkatan Jumlah kendaraan
Pengujian Kendaraan Bermotor	Jauhnya jarak tempuh dari tempat pemilik kendaraan ke tempat pengujian KBM Minimnya tenaga Penguji Kendaraan Bermotor Infrastruktur menuju gedung pengujian yang belum memadai, Alat Uji Kendaraan Bermotor belum memenuhi Standar Kemenhub	Merupakan suatu syarat sebagai perlengkapan setiap kendaraan bermotor untuk pengurusan STNK Kesadaran masyarakat yang tinggi pentingnya persyaratan teknis untuk keselamatan dalam berkendara

Koordinasi	Masih tingginya ego sektoral; Lemahnya pihak terkait dalam melakukan Komunikasi dan Konsultasi Tidak adanya sanksi yang tegas bagi yang tidak melaksanakan hasil koordinasi; Permasalahan yang semakin kompleks	Adanya kewenangan yang diberikan menurut peraturan dan perundangan; Adanya wadah untuk melaksanakan kegiatan koordinatif;
Perumusan Rancangan Regulasi	Adanya aturan-aturan yang tidak sinkron dan kurang sesuai dengan kondisi daerah; Perubahan peraturan yang relatif cepat;	Dinamika tuntutan dan kebutuhan pembangunan yang terus meningkat dan berkembang; Implementasi Otonomi daerah;

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi merupakan faktor-faktor penentu keberhasilan daerah dengan mengkaji lingkungan yang meliputi kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh-pengaruh yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, karena lingkungan internal maupun eksternal dapat di kendalikan maupun tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja Dinas Perhubungan dalam melaksanakan fungsi pemerintah maupun pembangunan, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Berkaitan dengan penyusunan rencana program dan kegiatan, maka perlu adanya rumusan permasalahan yang akurat dan jelas sesuai dengan potensi-potensi yang ada. permasalahan-permasalahan perlu juga dicantumkan agar terjadi kesinambungan rencana program atau kegiatan, karena pada dasarnya program atau kegiatan adalah pemecahan masalah yang sedang atau akan dihadapi melalui optimalisasi potensi yang dimiliki.

Kendala dan permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan urusan angkutan barang belum tertata dengan maksimal dan belum tersedianya Terminal Angkutan Barang, kualitas kendaraan angkutan orang, izin trayek belum tertata secara maksimal.
2. Penyelenggaraan urusan perhubungan bidang laut dan udara. Bidang Laut belum adanya rambu-rambu sungai, pendangkalan alur sungai belum terdatanya kapal-kapal dengan tonas dibawah 7 GT.
3. Kualitas SDM terutama pada permasalahan kompetensi dan perbandingan antara sarjana (S1/S2), sarjana muda dan petugas teknis (STM/SMA), masih sangat jauh dari harapan sehingga diperlukan pendidikan, latihan keterampilan untuk meningkatkan SDM pada level terendah menjadi tingkat sarjana muda.
4. Masih Kurangnya Tenaga Penguji Kendaraan Bermotor, Teknisi PJU dan Teknisi APILL sehingga diperlukan pendidikan dan pelatihan.

Tabel T-B.35

Pemetaan Permasalahan untuk menentukan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Masih Terbatasnya Angkutan Umum yang laik Jalan	Minimnya Penyedia Jasa Angkutan Umum	Minimnya Angkutan Umum Yang Laik Jalan
2.	Minimnya Pengemudi Angkutan Umum Yang Memiliki SIM Umum	Kurangnya Pemahaman Pengemudi terhadap Aturan angkutan umum	Minimnya Pengemudi Angkutan Umum Yang Memiliki SIM Umum
3.	Masih Tingginya Pelanggaran Angkutan Umum di Jalan	Belum maksimalnya sosialisasi peraturan perhubungan	Tingginya Pelanggaran Angkutan Umum di Jalan
4.	Masih Tingginya Angka Kecelakaan Lalu Lintas Jalan	Kelengkapan fasilitas jalan belum mencukupi	Tingginya Angka Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
5.	Masih Rendahnya PAD Sektor Perhubungan	Masih belum maksimalnya pengelolaan PAD Sektor Perhubungan	Masih rendahnya Pengelolaan PAD Sektor Perhubungan
6.	Masih Rendahnya Tingkat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Perhubungan	Terbatasnya SDM bidang Perhubungan Terutama pada SDM Teknis	Rendahnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan dan strategi dalam pelayanan Perangkat Daerah.

a. VISI

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 – 2021 merupakan tahap ketiga Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang berlandaskan kepada pelaksanaan, pencapaian dan

keberlanjutan dari RPJMD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2011 – 2015 dengan Visi pembangunan “Indragiri Hulu Sejahtera Tahun 2015”. Visi periode kedua ini diperkuat dengan menjadikan seluruh masyarakat Indragiri Hulu lebih sejahtera, lahiriah dan bathiniah sehingga Visi RPJMD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 – 2021 adalah **“Mewujudkan Indragiri Hulu yang Lebih Sejahtera Tahun 2020”**, dengan motto **“ Tak Ada Kata Menyerah”**

Filosofi perwujudan **“Lebih Sejahtera”** sejalan dengan pernyataan **“sejahtera”** pada Visi pada RPJPD yang dimaknai bahwa kondisi yang ingin diwujudkan di Kabupaten Indragiri Hulu pada akhir masa pembangunan jangka menengah ketiga tahun 2016 - 2021 ini adalah lebih kesejahteraan dari periode sebelumnya yang meliputi:

Sosial, dimana kondisi dimana kehidupan masyarakat memiliki hubungan dan komunikasi yang dinamis, berimbang, merata ke seluruh lapisan, golongan dan kelompok masyarakat tanpa diskriminatif, serta responsif, sehingga memiliki kekuatan dan jejaring guna menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi penyelenggaraan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa dengan tetap berlandaskan nilai-nilai kultural yang telah tumbuh dan berkembang selama ini, yakni nilai-nilai budaya Melayu, rasa kekeluargaan, kebersamaan dan kegotong royongan. Disamping itu adanya kesetaraan sosial antara masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu dengan masyarakat lainnya yang telah maju dan berkembang terlebih dahulu.

Ekonomi, dimana kondisi dimana perekonomian masyarakat dan daerah telah maju, dinamis dan berkembang sejalan dengan tuntutan persaingan global. Faktor efisiensi dan efektifitas merupakan faktor penentu untuk mencapai kesejahteraan ekonomi masyarakat secara adil dan merata, kemampuan daya beli masyarakat yang tinggi, daya saing yang semakin kuat terhadap tenaga kerja dan produk dari Kabupaten Indragiri di pasar lokal, domestik, regional dan internasional.

Politik, dimana suasana penyelenggaraan pemerintahan yang sangat demokrasi, transparan, partisipatif, dan akuntabilitas sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government, sehingga pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan akan optimal, berkualitas dan cakupan jangkauan pelayanan publik yang semakin luas, merata, efisien dan efektif. Sementara itu kesadaran politik rakyat terus maju dan berkembang dengan tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan, rasa persaudaraan, kebersamaan, kekeluargaan dan gotong royong yang semakin kuat dan mengakar, serta menjaga stabilitas politik yang telah kondusif.

b. MISI

Penyataan visi dengan kata kunci “**sejahtera**” tidak hanya pada aspek lahiriah dengan indikator-indikator ekonomi, keterjangkauan/aksesibilitas pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tetapi juga aspek bathiniah berupa rasa aman, sentosa dan makmur, dalam beribadah maupun berusaha. Dalam pembangunan Indragiri Hulu kedepan dilakukan dengan tidak membedakan suku, agama, ras maupun profesi. Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan juga isu-isu strategis maka ditempuh melalui 7 misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan sumberdaya aparatur dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
2. Meningkatkan pengawasan dalam tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
3. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.
4. Meningkatkan pemerataan ketersediaan infrastruktur fasilitas umum dan fasilitas sosial.
5. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan sosial serta memperkuat daya saing daerah.
6. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
7. Meningkatkan keharmonisan bermasyarakat tanpa membedakan suku, agama dan profesi.

c. Telaah Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: Mewujudkan Indragiri Hulu yang Lebih Sejahtera Tahun 2020				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan sumberdaya aparatur dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat	Minimnya Sumber Daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan SDM maupun Anggaran tidak memadai untuk pengembangan Peningkatan SDM 2. Luas wilayah yang tidak sebanding dengan jumlah SDM yang dimiliki 3. Minimnya Ketersediaan Anggaran APBD Dinas Perhubungan terhadap kegiatan peningkatan SDM (Bimtek dan Pelatihan) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya APBD yang dialokasikan untuk peningkatan SDM 2. Keinginan aparatur yang tinggi untuk Mengikuti Kegiatan Peningkatan SDM dalam rangka Peningkatan Pelayanan Prima

			4. Penempatan aparatur yang tidak sesuai dengan kemampuan dan keahlian	
2.	Meningkatkan pengawasan dalam tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.	Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang ada di Dinas Perhubungan	Pengetahuan yang masih terbatas Terbatasnya anggaran pembangunan	Keinginan aparatur yang tinggi untuk Mengikuti Kegiatan Peningkatan SDM dalam rangka Peningkatan Pelayanan Prima
3.	Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat	1. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang peraturan lalu lintas 2. Belum terbukanya jaringan trayek di daerah pedesaan	1. Belum adanya peningkatan jalan di daerah pedesaan 2. Terbatasnya sarana untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat	Pemasaran hasil produksi dan pertumbuhan Penduduk Relatif tinggi
4.	Meningkatkan pemerataan ketersediaan infrastruktur fasilitas umum dan fasilitas sosial	Minimnya Infrastruktur sarana dan prasarana perhubungan (Dermaga/ Pelabuhan), Kapal/Perahu/ Kompang, serta terminal di wilayah pedesaan	1. Terbatasnya sarana untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat 2. Masih Rendahnya sarana dan Prasarana Perhubungan yang sangat di butuhkan masyarakat 3. Peran serta pihak swasta masih rendah	1. Kebutuhan akan transportasi masyarakat sangat tinggi 2. Perlunya informasi bagi masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan pendidikan
5.	Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan sosial serta memperkuat daya saing daerah	Belum optimalnya organisasi yang bergerak di bidang transportasi; Kwalitas dan kuantitas sarana transportasi, maupun informasi belum memadai	Peran serta pihak swasta masih rendah dalam hal penyedia alat transportasi (Travel/ Kapal/ Kompang, dll) Masih rendahnya sarana dan prasarana perhubungan Bidang Pehubungan Perairan	Masyarakat yang kreatif dan berdaya saing untuk memajukan tingkat perekonomian melalui jalur transportasi Pemasaran hasil produksi dan pertumbuhan Penduduk Relatif tinggi

6.	Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.	Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang relative Masih Primitif dan Pengelolaan hasil alam yang belum maksimal	Terbatasnya sarana untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat Masih Rendahnya sarana dan Prasarana Perhubungan yang sangat di butuhkan masyarakat	Tingginya Kreasi Hasil Sumber Daya Alam pertumbuhan Penduduk Relatif tinggi Tingginya Daya Saing
7.	Meningkatkan keharmonisan bermasyarakat tanpa membedakan suku, agama dan profesi	Tingginya keegoan suku, adat, agama dan Profesi	Rendahnya Informasi dan pengetahuan, mengingat sebagian daerah masih terisolasi	Tingginya Toleransi masyarakat secara umum

3.3. Telaah Renstra Kementrian / Lembaga (K/L) dan Renstra Perangkat Daerah

Faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota

Telaah Renstra Kementrian / Lembaga (K/L) dan Renstra Organisasi Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten	Sasaran pada Renstra SKPD Provinsi	Sasaran pada Renstra K/L
1.	Kondisi prasarana dan sarana Perhubungan baik	75%	Meningkatkan keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai standar pelayanan minimal	Keselamatan dan Keamanan
2.	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaingan jalan	71,42 %	Meningkatkan aksestabilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan koneksitas antar wilayah	Pelayanan Transportasi

3.	Tersedianyan Halte pada setiap yang telah di lalui angkutan umum	73%	Meningkatkan kapasitas sarana dan prasaran transportasi kelembagaan dan reformasi regulasi	Kegiatan Transportasi
4.	Tersedianya Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu-Rambu, Marka, LPJU)	60,63 %	Meningkatkan perkembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan sebagai antisipasi perubahan iklim	Keselamatan dan Keamanan
5.	Tersedianya unit PKB	1 Unit	Meningkatnya Jumlah kendaraan Umum yang laik jalan	Keselamatan dan Keamanan
6.	Tersedianya SDM Bidang PKB	37,5 %	Meningkatkan kualitas SDM dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan dan reformasi regulasi	Keselamatan dan Keamanan
7.	Tersedianya SDM Terminal	10,26 %	Meningkatkan kualitas SDM dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan dan reformasi regulasi	Pelayanan Transportasi

Telaah Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi

No	Sasaran	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1	2	4	5
1.	Meningkatkan keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai standar pelayanan minimal	Belum tersedianya sarana dan prasarana transportasi secara menyeluruh dan memadahi	Pertumbuhan Bangkitan lalu lintas, yang membutuhkan sarana transportasi
2.	Meningkatkan aksestabilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan koneksitas antar wilayah	Infrastruktur transportasi kurang memadahi, serta muatan yang cenderung over load yang mempercepat kerusakan jalan	Kebutuhan masyarakat terhadap sarana transportasi untuk memasarkan hasil produksi perkebunan, pertanian maupun industri

3.	Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi kelembagaan dan reformasi regulasi	Keterbatasan sumber daya Manusia yang ada, yang mampu menangani sistem transportasi	Regulasi yang memungkinkan sebagai dasar pelaksanaan tugas
4.	Meningkatkan kualitas SDM dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan dan reformasi regulasi	Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang ada, yang mampu menangani sistem transportasi	Regulasi yang memungkinkan sebagai dasar pelaksanaan tugas
5.	Meningkatkan perkembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan sebagai antisipasi perubahan iklim	Masih banyaknya angkutan umum yang sudah melebihi usia pakai	Kebutuhan terhadap angkutan umum Perawatan secara berkala yang mampu dilakukan oleh pemilik kendaraan

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS

Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
1.	Sistem Jaringan Prasarana Transportasi Darat	Kelengkapan Fasilitas Jalan dan Terminal masih kurang	Pengadaan Fasilitas Jalan, Rambu-Rambu, Angkutan Penumpang.	Ruang wilayah yang tanggap terhadap rencana yang berwawasan lingkungan dalam menciptakan masyarakat yang Sejahtera, Demokratis dan Berdaya saing.	Penggunaan Jasa Angkutan Umum semakin tinggi terhadap Angkutan Sewa dan memaksimalkan penggunaan Terminal
2.	Sistem Jaringan Prasarana Angkutan Sungai	Dangkalnya Sungai Indragiri	Diperlukan Pengerukan/Pendalaman Sungai Indragiri	Pemanfaatan Angkutan Sungai dapat mengurangi Angkutan Darat terutama Angkutan Barang	Pemanfaatan Pelabuhan semakin maksimal

3.	Sistem Jaringan Prasarana Transportasi Udara	Masih terbatasnya Rute Penerbangan	Perpanjangan Runway/Landasan Pacu Pendaratan Pesawat	Fasilitas Bandara memadai sehingga Pesawat yang lebih besar dapat mendarat	Dapat melayani Rute antar Provinsi terutama Jakarta
----	--	------------------------------------	--	--	---

Terhadap hasil telaahan pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis tersaji pada tabel 3.5 Dan tabel 3.6

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			4	5
1	Mengembangkan jaringan infrastruktur terpadu dan berkelanjutan dalam skala kota dan wilayah sekitarnya	Belum adanya masterplan transportasi kota yang komperesif (angkutan umum, angkutan barang, angkutan kereta, dan angkutan laut)	Belum adanya integrasi perencanaan transportasi angkutan umum dan barang	Peningkatan kinerja kerjasama antar kota untuk membangun terminal-terminal logistik sebelum masuk ke Kabupaten Indragiri Hulu. Undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan

Tabel 3.6
Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Analisis KLHS
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan
Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			4	5
1	2	3	4	5
	Meningkatnya pencemaran udara yang berpotensi menyebabkan efek gas rumah kaca dan perubahan iklim	Tidak adanya sanksi yang tegas terhadap penggunaan bahan bakar	Kurang tersedianya bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan	Perlu adanya pembatasan kendaraan bermotor dan subsidi bahan bakar bagi pengguna kendaraan

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Setelah memperhatikan faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah yang ditinjau dari:

- 1) Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- 2) Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
- 3) Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/ kabupaten/ kota;
- 4) Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
- 5) Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya diperoleh informasi apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah.

Adapun Isu-isu strategis yang dihadapi oleh dinas perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu berkaitan dengan permasalahan tugas pokok dan fungsi OPD adalah:

1. Mimimnya kualitas SDM Teknis Dinas Perhubungan di Bidang LLAJ, LLASD, Transportasi Darat, PPNS, Pengujian Kendaraan Bermotor, Teknisi PJU, Teknisi APILL dll
2. Angkutan umum yang belum memenuhi standar keselamatan dan pelayanan
3. Masih kurang disiplin dan rendahnya pengetahuan tata tertib berlalulintas pengguna jalan
4. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap penggunaan perlengkapan keselamatan berkendaraan.
5. Faktor kondisi geografis daerah yang jarak tempuhnya relatif jauh sehingga mempengaruhi masyarakat untuk melakukan uji kendaraan bermotor.

6. Fasilitas pendukung transportasi (terminal, halte, taxi way) diperlukan penanganan lebih lanjut agar dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi
7. Rendahnya pengawasan terhadap kondisi dan fungsi fasilitas dan perlengkapan jalan yang sudah terpasang, seperti rambu lalu lintas, traffic light, marka jalan, dll
8. Kurangnya sarana dan prasarana perlengkapan jalan
9. Rendahnya ketersediaan lahan parkir yang memadai
10. Kurangnya peralatan uji kendaraan bermotor sesuai ketentuan yang berlaku.
11. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana penyeberangan sungai
12. Belum terlaksananya edukasi keselamatan lalu lintas
13. Belum terpenuhinya sosialisasi keselamatan lalu lintas angkutan sungai dan angkutan darat
14. Belum terlaksananya inspeksi keselamatan lalu lintas angkutan jalan
15. Belum terpenuhinya koneksitas pemadu moda transportasi lalu lintas angkutan sungai, darat.
16. Belum terlaksana pengendalian keselamatan pada ZoSS (Zona Selamat Sekolah)
17. Belum terlaksananya sinkronisasi terhadap penerbitan izin bangunan yang berkaitan dengan analisis dampak lalu lintas
18. Belum Tersedianya Terminal Angkutan barang di Kabupaten Indragiri Hulu

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu, selalu mengacu pada visi dan misi Kabupaten Indragiri Hulu “Indragiri Hulu Lebih Sejahtera 2020” sebagai tolak ukur dan pedoman dalam melaksanakan program kegiatan. Perumusan visi dan misi jangka menengah SKPD merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen Renstra SKPD sebagai hasil analisis sebelumnya. Visi menjelaskan arah suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Disini visi diciptakan melampaui realitas sekarang. Visi bukan hanya mimpi atau serangkaian harapan, tetapi suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, visi didasarkan pada realita, bukan pikiran berandai-andai, tetapi dengan fokus pada masa depan. Pernyataan visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi.

Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai SKPD melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi kepala daerah maupun dalam upaya mencapai klinerja pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan, layanan dan peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan.

Sebagai gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan agar tetap eksis, inovatif dan produktif. Disamping itu visi merupakan suatu cara pandang jauh ke depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu. Dengan ini Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu menjabarkan visinya sebagai berikut:

“Terwujudnya Sistem Transportasi yang Handal Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021”

Dalam mewujudkan visi Dinas perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu menetapkan misi yang harus dilaksanakan yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan sarana, prasarana, dan teknologi transportasi

2. Meningkatkan sumber daya aparatur perhubungan yang berkualitas
3. Mewujudkan kesadaran masyarakat berbudaya transportasi
4. Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Dinas Perhubungan

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan arah kebijakan yang akan dicapai oleh sebuah organisasi dalam ukuran waktu tertentu yang didalamnya mengandung usaha untuk melaksanakan suatu tindakan

Adapun tujuan untuk mencapai misi Dinas Perhubungan adalah:

- a. Mewujudkan Sarana Transportasi Yang Aman
- b. Mewujudkan Pelayanan Jasa Transportasi Yang Berkualitas
- c. Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Dinas Perhubungan

Sasaran yang ingin dicapai Dinas Perhubungan, adalah:

1. Meningkatnya Ketersediaan Sarana Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan
2. Terwujudnya Lalu Lintas Transportasi Darat Yang Berkeselamatan
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan yang Efektif dan Efisien

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel T-C.25

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
				1	2	3	4	5	6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Mewujudkan Sarana Transportasi Yang Aman	Meningkatnya Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase ketersediaan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	55%	60%	65%	70%	75%	80%
			Persentase Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang dipelihara	55 %	60%	65%	70%	72,5%	75%
		Terwujudnya lalu lintas transportasi darat yang berkeselamatan	Persentase pelanggaran angkutan umum di jalan	50%	47,5%	45%	40%	35%	30%
			Angka kecelakaan lalu lintas jalan	>500	<500	<450	<400	<350	<250
2.	Mewujudkan pelayanan jasa transportasi yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas pelayanan transportasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,00 (Baik)	3,10 (Baik)	3,20 (Baik)	3,35 (Baik)	3,50 (Baik)	3,60 (Baik)
			Meningkatnya PAD Sektor Perhubungan	RP. 300.000.000	RP. 350.000.000	RP. 973.910.000	RP. 1.123.120.000	RP. 1.200.000.000	RP. 1.250.000.000

3.	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Baik (goodgovernance)	Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas	Presentase Temuan Audit BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Nilai Akuntabilitas	50 (C)	55 (CC)	60 (B)	67,5 (B)	70,0 (B)	72,5 (BB)

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas, dilakukan melalui berbagai strategi, kebijakan dan program. Strategi merupakan cara mencapai seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategik, yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam mengembangkan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan sinergisitas dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi organisasi. Berdasarkan uraian diatas Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel T.C.26 berikut ini :

Tabel T-C.26.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI	:	Mewujudkan Indragiri Hulu yang Lebih Sejahtera Tahun 2020		
MISI IV	:	<i>Meningkatkan pemerataan ketersediaan infrastruktur fasilitas umum dan fasilitas sosial</i>		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Mewujudkan Sarana Transportasi Yang Aman	Meningkatnya Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	➤ Menciptakan sistem jaringan lalu lintas yang sesuai dengan kebutuhan kinerja lalu lintas	➤ Penyediaan prasarana dan fasilitas perhubungan sesuai dengan kebutuhan kinerja lalu lintas	
		➤ Melaksanakan rehabilitasi prasarana dan fasilitas perhubungan	➤ Penyelenggaraan kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan	
	Terwujudnya Lalu Lintas Transportasi Darat Berkeselamatan	➤ Meminimalisir Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Jalan	➤ Peningkatan pengawasan kelancaran, keamanan dan ketertiban lalu lintas ➤ Meningkatkan Jumlah Fasilitas	

			Perlengkapan Jalan
Mewujudkan pelayanan jasa transportasi yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi	➤ Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis dan non teknis bagi aparatur Dinas Perhubungan	➤ peningkatan kompetensi aparatur dengan pendidikan teknis dan non teknis
		➤ menciptakan sistem kerja yang profesional dengan meningkatkan sarana dan prasarana kantor	➤ Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana kantor
		➤ melaksanakan kegiatan pengujian kendaraan bermotor	➤ menyelenggarakan kegiatan pengujian kendaraan bermotor yang handal dan profesional
		➤ melaksanakan peremajaan sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	➤ Peningkatan kualitas sarana pengujian kendaraan bermotor (PKB)
Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas	➤ Meningkatkan nilai akuntabilitas Dinas Perhubungan	➤ Memperbaiki dokumen saki ➤ Meningkatkan Kualitas SDM

BAB VI

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Perubahan Rencana strategis Dinas Perhubungan 2016-2021 disusun dengan maksud sebagai arah dan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai personil, sebagai informasi dan sebagai acuan pencapaian target kinerja dan rencana kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu.

Dalam implementasi kegiatan dan fungsi Dinas Perhubungan memiliki tanggung jawab berkaitan dengan penegakan misi yang ditetapkan untuk 5 tahun 2016-2021.

Didalam usaha pencapaian misi-misi tersebut Dinas Perhubungan telah menyusun Perubahan rencana program, kegiatan dan pendanaan untuk tahun 2016-2021 yang di tuang dalam bentuk matrik sebagai berikut:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi			
										Tahun-1 2017		Tahun-2 2018		Tahun-3 2019		Tahun-4 2020		Tahun-5 2021				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			7				PERHUBUNGAN																	
			7	1			DINAS PERHUBUNGAN			3.409.347		2.281.745		33.165.862		20.064.155		21.012.014		79.933.122				
Meningkatnya Birokrasi Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas	Nilai Akuntabilitas	7	1	1		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	1.787.736	100	1.408.555	100	20.651.354	100	10.124.508	100	10.157.640	100	44.129.792	Dishub	Inhu	
		Persentase Temuan Audit BPK/ Inspektorat yang Ditindaklanjuti	7	1	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan jasa surat menyurat dilaksanakan	12 bulan	12 bulan	7.200	12 bulan	7.200	12 bulan	9.000	12 bulan	9.000	12 bulan	9.000	60 bulan	41.400	Dishub	Inhu	
		Persentase ASN yang Kompetensi, Profesional dan Berintegritas	7	1	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dilaksanakan	12 bulan	12 bulan	73.200	12 bulan	82.500	12 bulan	14.638.585	12 bulan	7.632.386	12 bulan	7.809.018	60 bulan	30.235.689	Dishub	Inhu	

			7	1	1	8	Penyediaan jasa kebersihan Kantor	Jumlah bulan jasa kebersihan kantor dilaksanakan	12 bulan	12 bulan	26.600	12 bulan	16.754	12 bulan	26.754	12 bulan	26.754	60 bulan	123.615	Dishub	Inhu	
			7	1	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dilaksanakan	12 bulan	12 bulan	60.374	12 bulan	65.023	12 bulan	83.377	12 bulan	77.000	60 bulan	362.774	Dishub	Inhu	
			7	1	1	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Peggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dilaksanakan	12 bulan	12 bulan	333.166	12 bulan	250.189	12 bulan	175.000	12 bulan	105.000	60 bulan	963.355	Dishub	Inhu	
			7	1	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik / Penerangan bangunan kantor dilaksanakan	12 bulan	12 bulan	23.810	12 bulan	15.081	12 bulan	4.163.378	12 bulan	21.417	60 bulan	4.245.103	Dishub	Inhu	
			7	1	1	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	60 unit	13 unit	161.233	0 unit	0	15 unit	275.000	32 unit	270.500	90 unit	125.000	831.733	Dishub	Inhu
			7	1	1	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dilaksanakan	12 bulan	12 bulan	7.680	12 bulan	7.681	12 bulan	8.449	12 bulan	9.431	60 bulan	42.672	Dishub	Inhu	

			7	1	1	17	Penyediaan Makanan dan Minum	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman dilaksanakan	12 bulan	12 bulan	32.700	12 bulan	47.250	12 bulan	56.650	12 bulan	42.000	12 bulan	42.000	60 bulan	220.600	Dishub	Inhu
			7	1	1	18	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah bulan terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 bulan	12 bulan	460.820	12 bulan	281.309	12 bulan	498.000	12 bulan	498.000	12 bulan	498.000	60 bulan	2.236.129	Dishub	Inhu
			7	1	1	19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis perkantoran	Jumlah bulan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran dilaksanakan	12 bulan	12 bulan	471.325	12 bulan	547.419	12 bulan	602.161	12 bulan	1.313.020	12 bulan	1.320.020	60 bulan	4.253.945	Dishub	Inhu
			7	1	1	20	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah bulan terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 bulan	12 bulan	129.629	12 bulan	88.150	12 bulan	115.000	12 bulan	120.000	12 bulan	120.000	60 bulan	572.779	Dishub	Inhu
														0									
Meningkatnya Birokrasi Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas	Nilai Akuntabilitas	7	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Terpeuhinya Sarana dan Prasarana Kantor dan Pemeliharaan Peralatan Kerja	100	100	325.576	100	279.006	100	744.133	100	1.335.496	100	1.301.307	100	3.985.518	Dishub	Inhu
		Persentase Temuan Audit BPK/ Inspektorat yang Ditindaklanjuti	7	1	2	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	0							2 Unit	225.496	2	249.000	5 Unit	474.496	Dishub	Inhu

		Persentase ASN yang Kompetensi, Profesional dan Berintegritas	7	1	2	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Unit Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1 unit							10 unit	1000	10 Unit	1000	Dishub	Inhu		
			7	1	2	10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah unit pengadaan mebeluer tersedia	48 unit		15 Unit	0	15 unit	200.000	48 unit	190.000	30 unit	150.000	90 unit	540.000	Dishub	Inhu	
			7	1	2	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah bulan pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor dilaksanakan	12 bulan	12 bulan	49.500	12 bulan	30.000	12 bulan	45.000	12 bulan	70.000	12 bulan	80.807	60 bulan	275.307	Dishub	Inhu
			7	1	2	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah bulan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional dilaksanakan	12 bulan	12 bulan	233.076	12 bulan	205.924	12 bulan	225.051	12 bulan	250.000	12 bulan	275.000	60 bulan	1.189.051	Dishub	Inhu
			7	1	2	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah bulan pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor dilaksanakan	12 bulan	12 bulan	43.000	12 bulan	43.083	12 bulan	49.082	12 bulan	50.000	12 bulan	100.000	60 bulan	285.165	Dishub	Inhu
			7	1	2	42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah unit pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor dilaksanakan	0 unit			0 unit	0	1 unit	225.000	1 unit	550.000	1 unit	445.500	3 Unit	1.220.500	Dishub	Inhu

Meningkatnya Birokrasi Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas	Nilai Akuntabilitas	7	1	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Terciptanya Keseragaman dan Peningkatan Disiplin PNS	100	100	116.336	100	0	100	240.000	100	404.450	100	394.000	100	1.054.786	Dishub	Inhu
		Persentase Temuan Audit BPK/ Inspektorat yang Ditindaklanjuti	7	1	3	2	Pengadaan PDH beserta Atribut/Prengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	0	110 stel	116.336		0	100 stel	140.000	0 stel	276.950	100 stel	274.000	310 stel	807.286	Dishub	Inhu
		Persentase ASN yang Kompetensi, Profesional dan Berintegritas	7	1	3	5	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	0				100 stel	100.000	100 stel	127.500	100 stel	120.000	300 stel	347.500	Dishub	Inhu	
Meningkatnya Birokrasi Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas	Nilai Akuntabilitas	7	1	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Peningkatan Kemampuan dan Pemahaman PNS Terhadap Peraturan Yang Berlaku	95	95	80.000	95	50.000	95	150.000	95	200.000	95	194.880	95	674.880	Dishub	Inhu
		Persentase Temuan Audit BPK/ Inspektorat yang Ditindaklanjuti	7	1	5	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	10 orang	15 orang	80.000	15 orang	50.000	15 orang	150.000	15 orang	200.000	15 orang	194.880	75 orang	674.880	Dishub	Inhu
Tersusunnya Capaian kerja yang sempurna	Keunggulan dan kinerja Instansi	Laporan tepat waktu	07	01	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian	Persentase Tepenuhnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	100	100	7.502	100	11.534	100	0	100	0	100	0	100	19.036	Dishub	Inhu

							Kinerja dan Keuangan	Kinerja SKPD															
			07	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja yang tersusun	2 Dok	1 Dok	7.502	1 Dok	11.534	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	-	100	19.036	Dishub	Inhu
Mewujudkan Sarana Transportasi Yang Aman	Meningkatnya Keterseediaan Sarana, Prasarana dan Fasilitas perhubungan	Persentase tersedianya Sarana, Prasarana dan Fasilitas perhubungan	7	1	15		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase Tersedianya Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	3,00	60	56.800	60	69.479	62	1.565.000	65	1.200.000	70	1.364.160	70	4.255.439	Dishub	Inhu
Mewujudkan Pelayanan Jasa Transportasi Yang Berkualitas	Terwujud Lintas Transportasi Darat Berkeselamatan	Persentase Pengemudi Angkutan Umum Yang Memiliki SIM Umum	7	1	15	1	Perencanaan Pembangunan Fasilitas Perhubungan	Jumlah Dokumen Perencanaan Sarana dan Prasarana LLAJ dan Fasilitas Perhubungan tersedia	0			0 dokumen	0	1 Dokumen	3 Dokumen	640.000	1 dokumen	500.000	9 Dokumen	1.540.000	Dishub	Inhu	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi	Persentase Penurunan Pelanggaran Angkutan Umum di Jalan	7	1	15	2	Penyusunan Norma Kebijakan dan Standar Prosedur bidang Perhubungan	Jumlah norma kebijakan dan standar prosedur bidang perhubungan dan Peraturan Bupati di bidang	0			0	0		0 dokumen	150.000	1 dokumen	139.160	2 dokumen	289.160	Dishub	Inhu	

Mewujudkan Pelayanan Jasa Transportasi Yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi	IKM	7	1	16	01	Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah bulan pemeliharaan alat Pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan	12 bulan	12 bulan	127.435	12 bulan	57.130	12 bulan	30.900	12 bulan	120.000	12 bulan	119.000	60 bulan	454.465	Dishub	Inhu
			7	1	16	02	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Unit Balai pengujian Kendaraan Bermotor yang terpelihara	0					1 unit	50.000			1 unit	1.000	2 unit	51.000	Dishub	Inhu
			7	1	16	4	Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal / Pelabuhan	Jumlah bulan pemeliharaan Terminal / Pelabuhan dilaksanakan	12 bulan	0 bulan	0	12 bulan	24.000	12 bulan	50.000	12 bulan	50.000	12 bulan	52.720	48 bulan	176.720	Dishub	Inhu
			7	1	16	5	Rehabilitasi / Pemeliharaan Rambu-rambu Jalan	Jumlah bulan pemeliharaan rambu-rambu jalan dilaksanakan	12 bulan	12 bulan	152.176	12 bulan	64.250	12 bulan	750.000	12 bulan	420.000	12 bulan	400.000	60 bulan	1.736.426	Dishub	Inhu
			7	1	16	.06	Rehabilitasi/ Pemeliharaan LPJU dan APPIL	Jumlah bulan pemeliharaan LPJU dan APPIL dilaksanakan	0						12 bulan	85.000	12 bulan	85.000	24 bulan	170.000	Dishub	Inhu	
Mewujudkan Sarana Transportasi Yang Aman	Terwujudnya Lintas Transportasi Darat Berkeselamatan	Persentase Penurunan Pelanggaran Angkutan Umum di Jalan	7	1	17		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Prsentase meningkatnya Pelayanan Angkutan	30	60,00	539.676	60,00	161.618	70,00	8.511.618	80,00	1.351.770	85,00	2.291.564	85,00	12.856.246	Dishub	Inhu

Mewujudkan Pelayanan Jasa Transportasi Yang Berkualitas	Terwujudnya Lalu Lintas Transportasi Darat Berkeselamatan	Persentase Pengemudi Angkutan Umum Yang Memiliki SIM Umum	7	1	17	1	Penyuluhan bagi para sopir/juru Mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang	Jumlah peserta penyuluhan bagi para supir/ juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang	0						100 orang	0	100 orang	160.000	200 orang	160.000	Dishub	Inhu	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi	Persentase Penurunan Pelanggaran Angkutan Umum di Jalan	7	1	17	2	Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	Jumlah bulan Pelaksanaan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	0						12 bulan	0	12 bulan	150.000	12 bulan	150.000	Dishub	Inhu	
		Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan	7	1	17	4	Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna kelancaran penumpang	Jumlah bulan pelaksanaan uji kelayakan sarana transportasi guna kelancaran penumpang	0								12 bulan	150.000	24 bulan	150.000	Dishub	Inhu	
		IKM	7	1	17	5	Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	Jumlah bulan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya dilaksanakan	12 bulan	12 bulan	539.676	12 bulan	161.618	12 bulan	161.618	12 bulan	175.000	12 bulan	250.000	60 bulan	1.287.912	Dishub	Inhu
			7	1	17	6	Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal	Jumlah bulan penciptaan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal dilaksanakan	0						12 bulan	50.000	12 bulan	150.000	24 bulan	200.000	Dishub	Inhu	

			7	1	17	8	Kegiatan Penataan Tempat-tempat perhentian kendaraan umum	Jumlah bulan Penataan Tempat-tempat perhentian kendaraan umum dilaksanakan	0			0	12 bulan	75.000	12 bulan	100.000	12 bulan	130.000	36 bulan	305.000	Dishub	Inhu	
			7	1	17	10	Pengumpulan dan analisa database pelayanan angkutan kenyamanan	Jumlah Dokumen database yang tersusun	0			0	1 dok	200.000	1 dok	0	2 dok	476.564	4 dok	676.564	Dishub	Inhu	
			7	1	17	11	Pengembangan sarana dan prasarana Pelayanan Jasa angkutan	Jumlah sarana dan prasarana pelayanan dan angkutan tersedia	0			0	9 unit	8.000.000	2 Unit	926.770	1 Unit	500.000	12 Unit	9.426.770	Dishub	Inhu	
			7	1	17	14	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan supir/juru mudi/ awak/ kendaraan umum teladan.	Jumlah Peserta pemilihan supir/juru mudi/ awak/ kendaraan umum teladan terlaksana	0			0	40 orang	75.000	40 orang	100.000	40 orang	175.000	120 orang	350.000	Dishub	Inhu	
			7	1	17	15	Koordinasi dalam pelayanan Angkutan	Jumlah bulan terlaksananya koordinasinya dalam pelayanan angkutan	0							-	12 bulan	150.000	12 bulan	150.000	Dishub	Inhu	
Mewujudkan Pelayanan Jasa Transportasi Yang Berkualitas	Terwujudnya Lalu Lintas Transportasi Yang Berkualitas	Persentase Penurunan Pelanggaran Angkutan Umum di Jalan	7	1	18		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perhubungan	2,00	60,00	51.000	65	0	70	0	75	375.000	80	365.400	80,00	791.400	Dishub	Inhu

	Berkeselamatan																						
			7	1	18	1	Membangun Gedung Terminal	Jumlah Unit gedung terminal angkutan/ barang yang dibangun	0							1 unit	1.000	1 unit	1.000	Dishub	Inhu		
			7	1	18	2	Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal	Jumlah halte tersedia/ yang dilayani trayek	0	2 unit	51.000			2 unit	375.000	2 unit	364.400	6 unit	790.400	Dishub	Inhu		
Mewujudkan Sarana Transportasi Yang Aman	Terwujudnya Lalu Lintas Transportasi Darat Berkeselamatan	Kecelakaan Lalu Lintas Jalan	7	1	19		Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase Meningkatkan ketersediaan perlengkapan dan Pengamanan Lalu Lintas	60	60	0	60	0	70	522.857	80	3.967.931	85	3.866.351	85	8.357.139	Dishub	Inhu
		Angka Kecelakaan Lalu Lintas Jalan	7	1	19	.01	Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas	Jumlah rambu-rambu lalu lintas tersedia	0	0 unit	0	0 unit	0	100 unit	350.000	130 Unit	675.000	140 unit	700.000	370 unit	1.725.000	Dishub	Inhu
			7	1	19	.02	Pengadaan Marka Jalan	Jumlah panjang marka jalan tersedia	0								2500 M	260.000	2500 M	260.000	Dishub	Inhu	
			7	1	19	.03	Pengadaan Pagar pengaman Jalan	Jumlah pagar pengaman jalan tersedia	0						0	100 unit	200.000	100 unit	200.000	Dishub	Inhu		

			7	1	19	.04	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Jumlah bulan pengendalian dan pengamanan lalu lintas dilaksanakan	0	0 bulan	0	0 bulan	0	12 bulan	172.857	12 bulan	92.931	12 bulan	106.351	36 bulan	372.139	Dishub	Inhu
			7	1	19	.05	Pengadaan Zona Selamat Sekolah (Zoss)	Jumlah paket ZOSS tersedia	0								0	1 paket	300.000	1 paket	300.000	Dishub	Inhu
			7	1	19	.06	Pembangunan Taman lalu Lintas (Taman Edukatif Keselamatan Transportasi)	Jumlah paket taman edukatif lalu lintas tersedia	0								0	1 paket	300.000	2 paket	300.000	Dishub	Inhu
			7	1	19	.07	Pengadaan Sarana dan Prasarana LPJU dan APPIL	Jumlah Sarana Prasarana LPJU dan APPIL tersedia	0							1 Paket	3.200.000	1 Paket	2.000.000	2 Paket	5.200.000	Dishub	Inhu
Mewujudkan Pelayanan Jasa Transportasi Yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi	IKM			20		Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Persentase ketersediaan Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor (%)	0	-	0	-	0	50,00	0	60,00	430.000	75,00	418.992	75,00	848.992	Dishub	Inhu
			7	1	20	.02	Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor tersedia	0								0	1 paket	1.000	1 Paket	1.000	Dishub	Inhu

			7	1	20	.04	Pengadaan Buku Kir/Uji, Plat Kir/Uji dan Stiker Sampung Kendaraan Bermotor	Jumlah Buku KIR/UJI, Plat KIR/UJI, dan Stiker Sampung Kendaraan Bermotor tersedia	0						10 jenis	430.000	10 jenis	417.992	10 jenis	847.992	Dishub	Inhu	
Mewujudkan Sarana Transportasi Yang Aman	Meningkatkan Sarana Angkutan Umum yang Aman	Angka Kecelakaan Lalu Lintas Jalan	7	1	19		Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase Peningkatan ketersediaan Fasilitas perlengkapan dan Pengamanan Lalu Lintas	60	60	165.110	60	156.173	70	0	80	0	85	0	85	321.283	Dishub	Inhu
		Angka Kecelakaan Lalu Lintas Jalan	7	1	19	.01	Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas	Jumlah rambu-rambu lalu lintas tersedia	193 unit	125 unit	165.110	38 unit	67.016							163 unit	232.126	Dishub	Inhu
			7	1	19	.04	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Jumlah bulan pengendalian dan pengamanan lalu lintas dilaksanakan				12 bulan	89.157							12 bulan	89.157	Dishub	Inhu



RENGAT, Mei 2019
 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Drs. ERPANDI
 NIP.19630815 199309 1 001

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam implementasi kegiatan dan fungsi Dinas Perhubungan memiliki tanggung jawab berkaitan dengan pencapaian misi RPJMD Kabupaten Indragiri Hulu 2016-2021 memiliki sasaran dan indikator yang jelas, sasaran tersebut berhubungan erat dengan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Perhubungan 2016-2021.

Sasaran adalah suatu keadaan atau kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh suatu organisasi, baik tujuan jangka pendek atau jangka panjang dan sebagai alat ukur efisiensi dan efektifitas suatu organisasi. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar proses kegiatan dalam mencapai tujuan tersebut dapat lebih terarah, efektif dan efisien.

Dalam Perubahan rencana strategis Dinas Perhubungan tahun 2016-2021 ini, akan diuraikan sasaran beserta indikator dan tergetnya yang menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan yang merupakan penjabaran Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hulu 2016-2021 sebagaimana matriks terlampir.

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Tabel T-C.28

NO	INDIKATOR	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PERHUBUNGAN							
1.	Persentase Angkutan Umum Yang Laik Jalan	55%	60%	65%	70%	75%	80%	80%
2.	Persentase Pengemudi Angkutan Umum Yang Memiliki SIM Umum	50%	55%	60%	62,5%	65%	67,5%	67,5%
3.	Persentase Pelanggaran Angkutan Umum di Jalan Raya	50%	47,5%	45%	40%	35%	30%	30%
4.	Angka Kecelakaan Lalu Lintas Jalan	>500	<500	<450	<400	<350	<250	<250
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,00 (Baik)	3,10 (Baik)	3,20 (Baik)	3,35 (Baik)	3,50 (Baik)	3,60 (Baik)	3,60 (Baik)

BAB VIII

PENUTUP

Demikian Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan, Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016-2021 disusun sebagai Implementasi Kebijakan untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan di bidang Perhubungan, secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran. Apabila dalam perjalanan terjadi perubahan situasi dan kondisi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Renstra Dinas dapat ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian seperlunya.

Akhirnya kami berharap apa yang tertuang dalam Renstra ini dapat membantu meningkatkan Kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya Bidang Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu.

Ditetapkan di : Rengat
Tanggal : Mei 2019

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN INDRAGIRI HULU



Drs. ERPANDI
Pembina Utama Muda
NIP. 19630815 199309 1 001